



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 26 TAHUN 1996 SERI D NOMOR 15**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 1995
TENTANG
PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN AMBARAWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa wilayah pemusatan penduduk yang mewadai tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial, budaya dan ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga memerlukan pengarahannya atas perkembangannya;
- b. bahwa untuk mengarahkan perkembangan kota khususnya kota Kecamatan Ambarawa dipandang perlu untuk mengatur dan mengendalikannya dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Ambarawa;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan batas - batas wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang - undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);

5. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500),
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN AMBARAWA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Wilayah Kota adalah suatu wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mewadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial, budaya dan ekonomi perkotaan;
- e. Kota Kecamatan adalah suatu wilayah sebagaimana tersebut dalam huruf d di atas yang merupakan Ibu Kota Kecamatan, tidak berstatus sebagai Kota Administratif atau Kotamadya ;
- f. Batas wilayah Kota adalah garis batas yang memisahkan antara wilayah kota dan wilayah bukan kota.

BAB II WILAYAH KOTA

Pasal 2

- (1) Wilayah Kota Kecamatan Ambarawa meliputi :
 - a. Kelurahan Panjang seluruhnya;
 - b. Kelurahan Kranggan seluruhnya;
 - c. Kelurahan Lodoyong sebagian;

- d. Kelurahan Kupang seluruhnya;
 - e. Kelurahan Pojoksari sebagian;
 - f. Kelurahan Ngampin sebagian;
 - g. Desa Baran sebagian.
- (2) Memberikan Dasar Hukum dan Kepastian Hukum bagi pengaturan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Ambarawa

BAB III

LUAS WILAYAH

Pasal 3

Luas Wilayah Kota Kecamatan Ambarawa 934,12 ha, yang meliputi :

- a. Kelurahan Panjang seluruhnya seluas 258,00 ha.
- b. Kelurahan Kranggan seluruhnya seluas 29,20 ha.
- c. Kelurahan Lodoyong sebagian seluas 142,15 ha.
- d. Kelurahan Kupang seluruhnya seluas 234,00 ha.
- e. Kelurahan Pojoksari sebagian seluas 56,45 ha.
- f. Kelurahan Ngampin sebagian seluas 170,97 ha.
- g. Desa Baran sebagian seluas 43,35 ha.

BAB IV

BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kota Kecamatan Ambarawa adalah :
- a. Sebelah Utara : batas Desa Pasekan, Saluran Desa Baran, batas Kecamatan Bawen.
 - b. Sebelah Timur : Kali Rengas, batas desa Tambakboyo
 - c. Sebelah Selatan : Batas Desa Bejalen dan jalan batu
 - d. Sebelah Barat : Saluran Irigasi, batas Kecamatan Jambu
- (2) Untuk mempertegas Batas Wilayah Kota dimaksud ayat (1) Pasal ini dilapangan perlu dibuat Papan Nama Kota pada Batas Wilayah Kota di Jalan - jalan Utama masuk kota.

Pasal 5

Batas Wilayah Kota Kecamatan Ambarawa sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini secara rinci terdapat dalam Buku Penetapan batas Wilayah Kota dan Peta skala 1 : 20.000 yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di U n g a r a n
pada tanggal 23 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

Ketua,

cap

ttd.

Drs. SOEPONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

cap

ttd.

Drs. SOEDIJATNO

Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25
Nopember 1996 Nomor 188 - 3 / 376 / 1996

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tanggal 9
Desember 1996 Nomor 26 Seri D No. 15.

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Wilayah / Daerah.

cap

ttd.

Drs. WOERYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 872

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 1995
TENTANG
PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN AMBARAWA

I. PENJELASAN UMUM :

Perkembangan kota - kota, khususnya kota - kota kecil, semakin meningkat seiring dengan derap langkah kegiatan Pembangunan Nasional. Perkembangan kota - kota yang semakin meningkat tersebut memerlukan pengarah dalam perkembangannya. Pengarah terhadap perkembangan kota yang semakin meningkat di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dilaksanakan dengan mengatur dan mengendalikannya, yaitu dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan.

Penetapan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Ambarawa disusun untuk memperoleh struktur data yang jelas dan benar untuk dijadikan pedoman bagi Instansi Pemerintah dan masyarakat dalam mengatur, mengendalikan dan mengarahkan perkembangan fisik kota Ibukota Kecamatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang
Nomor : 18 Tahun 1995

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN AMBARAWA

KATA PENGANTAR

Perkembangan kota-kota, khususnya kota-kota kecil semakin meningkat seiring dengan derap langkah kegiatan pembangunan Nasional. Perkembangan kota-kota yang semakin meningkat tersebut memerlukan pengarah dalam perkembangannya. Pengarah terhadap perkembangan kota yang semakin meningkat dilaksanakan dengan mengatur dan mengendalikannya yaitu dengan menetapkan batas wilayah kota yang tidak berstatus sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II, Kotamadya maupun Kota Administratif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia, di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang telah dilaksanakan penetapan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan di 5 (lima) Wilayah Kecamatan, yaitu Ibukota Kecamatan Klepu, Ambarawa, Bringin, Suruh dan Tuntang.

Penetapan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Klepu, Ambarawa, Bringin, Suruh dan Tuntang tersebut merupakan pedoman bagi Instansi Pemerintah dan Masyarakat dalam mengatur, mengendalikan dan mengarahkan perkembangan fisik kota Ibukota Kecamatan.

Selanjutnya diharapkan agar dokumen penetapan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Klepu, Ambarawa, Bringin, Suruh dan Tuntang tersebut dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ungaran, Maret 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

cap ttd.

Drs. SOEDIJATNO

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Tujuan Penelitian Batas Wilayah Kota	1
C. Pendekatan Masalah	2
D. Metode Penelitian	3
E. Metode Analisa	4
BAB II PEMBENTUKAN TIM TEKNIS	5
BAB III KEADAAN UMUM WILAYAH PENGAMATAN	6
A. Penetapan Wilayah Pengamatan	6
B. Fakta Fisik	7
C. Pola Penggunaan Tanah	9
1. Wilayah Terbangunan	10
2. Wilayah Yang Belum Terbangun	11
D. Jaringan Jalan dan Fasilitas Pelayanan Umum	12
1. Jaringan Jalan	12
2. Fasilitas Pelayanan Umum	15
3. Fasilitas Kota	18
E. Status Tanah	19
F. Fakta Kependudukan	20
1. Jumlah dan Perkembangan Penduduk	20
2. Kepadatan Penduduk	20
3. Komposisi Umur Penduduk	21
4. Mata Pencarian Penduduk	23
BAB IV ANALISA DATA	26
A. Dasar Analisa	26
B. Analisis Kependudukan	27
C. Analisa Kebutuhan Ruang	28
1. Kebutuhan Ruang sampai Tahun 2008	28
2. Arah Perkembangan Fisik dan Ruang	28
3. Wilayah Pengembangan	30
BAB V KESIMPULAN	31
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL	1. Nama Desa / Kelurahan dan Luas Wilayah	6
	2. Luas Wilayah Terbangun dan Belum Terbangun dalam Wilayah Pengamatan Batas Wilayah Kota Kecamatan Ambarawa	9
	3. Penggunaan Tanah Wilayah Terbangun Dalam Wilayah Pengamatan Batas Wilayah Kota Ambarawa	10
	4. Jumlah Bangunan dan kerapatan Bangunan	11
	5. Penggunaan Tanah Wilayah Terbangun	12
	6. Kualitas dan Status Jalan di tiap-tiap kelurahan dan Desa dalam wilayah Pengamatan	14
	7. Jumlah Sekolah dan Murid yang ada dalam wilayah Pengamatan ..	15
	8. Jumlah Fasilitas Kesehatan, Tenaga Medis dan Paramedis di Wilayah Pengamatan Penetapan Batas Wilayah Kota Kec. Ambarawa.....	16
	9. Jumlah Tempat ibadah yang ada dalam Wilayah Pengamatan	17
	10. Jumlah Pemeluk Agama masing - masing Agama dalam wilayah Pengamatan	17
	11. Jumlah Penduduk selama 5 tahun di wilayah pengamatan	20
	12. Kepadatan Kotor Penduduk di Tiap Kelurahan dan Desa dalam Wilayah Pengamatan Penetapan Batas Wilayah Kota Ambarawa ...	20
	13. Kepadatan Bersih Penduduk di Tiap Kelurahan dan Desa dalam Wilayah Pengamatan Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan Ambarawa	21
	14. Jumlah penduduk Menurut Kelompok Umur	22
	15. Perbandingan antara jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif	23
	16. Mata Pencapaian Penduduk	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tanggal 29 Nopember 1986 Tentang Penetapan Batas Kota di seluruh Indonesia.,
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tanggal 1 Desember 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas wilayah Kota di seluruh Indonesia.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 135/168/PUOD tanggal 13 Januari 1987, tentang Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 1986.
4. Buku Petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 September 1987 tentang Petunjuk Pemetaan Batas Wilayah Kota.
5. Keputusan Bupati Kepala Daeah Tingkat II Semarang Nomor 136/916/1987 tanggal 1 4 Agustus 1987 tentang Pembentukan Tim Teknis Penetapan Batas Wilayah Kota.

B. TUJUAN PENELITIAN BATAS WILAYAH KOTA

1. Memperoleh struktur data yang jelas guna berbagai keperluan dalam mengendalikan dan mengatur perkembangan fisik kota sehingga selain diperoleh hasil pembangunan yang optimal juga agar sejauh mungkin tidak mengorbankan lahan produktif disekitarnya serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
2. Memudahkan bagi instansi Pemerintah atau Lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi non Pemeritah dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menentukan orientasi ataupun prioritas pengalokasian dana setiap kegiatan pembangunan kota.
3. Untuk mengendalikan dan memberi arah perkembangan fisik kota, khususnya dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang mempunyai motto Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera dan Indah (SERASI) serta dapat berfungsi mendukung perkembangan / pertumbuhan daerah - daerah disekitarnya.

C. PENDEKATAN MASALAH

1. Latar Belakang Masalah
 - a. Pertumbuhan dan perkembangan kota - kota di Indonesia pada akhir pelita V pada umumnya telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Perkembangan kota tersebut diakibatkan oleh semakin meningkatnya urbanisasi dan semakin besarnya volume maupun kegiatan pembangunan pada sektor perkotaan.
 - b. Perkembangan pembangunan kota tersebut khususnya kota - kota kecil yang disamping berperan memberikan pelayanan juga berfungsi sebagai pusat pengembangan fisik bagi wilayah sekitarnya, menghadapi permasalahan didalam

mengenali karakteristik dan besaran kotanya serta pengendalian pembangunan fisik yang terdapat di kota tersebut. Terjadinya permasalahan tersebut diatas adalah sebagai akibat tidak terdapatnya batas - batas kota kecil yang jelas dan berdasarkan suatu pengaturan yang bersifat menyeluruh yang dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan kotanya.

- c. Oleh karena itu guna meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan pada kota - kota kecil dipandang perlu untuk mengatur dan mengendalikan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota yang tidak berstatus Kotamadya maupun Kota Administratif.

2. Pendekatan Masalah

- a. Yang dimaksud Kota adalah suatu wilayah Administratif sesuai dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah yaitu sebagai tempat pemukiman, pemusatan penduduk dan segala aktivitasnya dimana di dalamnya terdapat fasilitas kota sebagai pendukung aktivitas penduduk. Dengan demikian kota pada hakekatnya adalah keseluruhan dari unsur - unsur bangunan, jalan, sejumlah manusia disuatu tempat tertentu dan saling kait mengkait antara satu dengan yang lain.

Kesatuan dari keseluruhannya antara satu dengan yang lain akhirnya memberikan corak terhadap kehidupan manusia yaitu dalam cara hidup dan sikapnya.

- b. Ditinjau dari aspek fisik wilayah kota mempunyai ciri :

- 1). Tempat pemukiman penduduk yang merupakan satu kesatuan dengan luas, jumlah bangunan, kepadatan bangunan yang relatif tinggi daripada wilayah sekitarnya.
- 2). Proporsi bangunan permanen lebih besar ditempat itu daripada wilayah sekitarnya.
- 3). Mempunyai lebih banyak bangunan, fasilitas sosial, ekonomi (Sekolah, Poliklinik, Pasar, Toko, Kantor Pemerintah) daripada wilayah sekitarnya.
Selanjutnya dalam Penetapan Batas Wilayah Kota ini penetapan Batas Wilayah Kota yang ditetapkan dalam hal ini adalah Kota Ibukota Kecamatan. Pengertian Batas Wilayah Kota adalah Batas yang memisahkan antara wilayah kota dengan wilayah bukan Kota (hinterland).

- c. Adapun permasalahan yang ada sebagai akibat belum adanya Penetapan Batas Wilayah Kotanya antara lain :

- 1). Pertumbuhan kotanya sendiri serta akibat dari pertumbuhan tersebut
- 2). Pertumbuhan sosial kota yang kurang seimbang.
- 3). Problematika transportasi sebagai akibat dari prasarana jalan, terminal, lalu lintas kota yang kurang memadai.
- 4). Perubahan sosial ekonomi diantaranya.
 - Rendahnya tingkat pendidikan.
 - Rendahnya tingkat perekonomian dsb.

- d. Dari permasalahan - permasalahan yang ada, maka pendekatan permasalahan yang dilakukan adalah bertitik tolak dari impaknya terhadap tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

- 1). Penentuan Batas Wilayah Kota
Secara optimal diusahakan seimbang dengan proyeksi besaran pertumbuhan disamping faktor penentu lainnya seperti kondisi fisik daerah.
- 2). Penentuan masing - masing kegiatan penduduk perlu dipertimbangkan faktor kenyamanan dan perluasan sehingga tidak perlu absolut dari standart yang ada.
- 3). Penyediaan prasarana yang ada yakni : Jaringan jalan, terminal antar pedesaan dan utilitas kota seperti air minum, listrik, telepon. Selain itu perlu dipikirkan tentang penyediaan tempat - tempat parkir lingkungan.
3. Kota - kota yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah :
 - a. Ibukota Kabupaten yang merupakan pusat kegiatan penduduk dan pusat pemerintahan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang terletak di Ungaran.
 - b. Tempat kedudukan Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang terdiri dari empat Pembantu Bupati yaitu :
 1. Pembantu Bupati Untuk Wilayah Ungaran berkedudukan di Ungaran.
 2. Pembantu Bupati Untuk Wilayah Ambarawa berkedudukan di Ambarawa.
 3. Pembantu Bupati Untuk Wilayah Tenganan berkedudukan di Tenganan.
 4. Pembantu bupati untuk Wilayah Salatiga berkedudukan di Tuntang.
 - c. Ibukota Kecamatan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang terdiri dari 14 Kecamatan dan 4 Perwakilan Kecamatan yaitu :
 1. Ibukota Kecamatan Ungaran terletak di Ungaran.
 2. Ibukota Kecamatan Klepu terletak di Bergas Lor.
 3. Ibukota Kecamatan Bawen terletak di Harjosari
 4. Ibukota Kecamatan Ambarawa terletak di Ambarawa.
 5. Ibukota Kecamatan Sumowono terletak di Sumowono.
 6. Ibukota Kecamatan Jambu terletak di Jambu.
 7. Ibukota Kecamatan Banyubiru terletak di Banyubiru.
 8. Ibukota Kecamatan Tntang di terletak di Tuntang.
 9. Ibukota Kecamatan Pabelan terletak di Pabelan.
 10. Ibukota Kecamatan Getasan terletak di Getasan
 11. Ibukota Kecamatan Suruh terletak di Suruh.
 12. Ibukota Kecamatan Bringin terletak di Bringin.
 13. Ibukota Kecamatan Susukan terletak di Susukan.
 14. Ibukota Kecamatan Tenganan terletak di Tenganan.
 15. Perwakilan Kecamatan Klepu terletak di Pringapus .
 16. Perwakilan Kecamatan Ambarawa terletak di Bandungan.
 17. Perwakilan Kecamatan Susukan terletak di Kafiwungu
 18. Perwakilan Kecamatan Bringin terletak di Bancak.

D. METODE PENELITIAN

1. Penetapan Wilayah Penelitian.
Dalam menentukan wilayah Penelitian, ditentukan terlebih dahulu Desa tempat kedudukan Pusat Pemerintahan tingkat Kecamatan, selanjutnya desa - desa sekitarnya yang diperkirakan berkembang menjadi daerah ibukota.
Penentuan Wilayah Perencanaan ini didasarkan beberapa pertimbangan antara lain :

- Topografi Wilayah
 - Pola Penggunaan Tanah
 - Jumlah dan kepadatan penduduk.
 - Penyebaran tempat penting
 - Jumlah dan penyebaran fasilitas perkotaan
 - Kondisi Bangunan
2. Pemetaan
- Setelah wilayah penelitian, maka seluruh wilayah yang diteliti diadakan pemetaan. Dengan menggunakan dasar peta Topografis skala 1 : 50,000 diadakan perbaikan melalui pemetaan langsung, sedangkan Peta yang dihasilkan adalah :
1. Penentuan wilayah Penelitian (dalam Peta ini berisi tempat penting, wilayah, Jaringan jalan, dan tata air).
 2. Pola Penggunaan jalan.
 3. Kondisi Wilayah Penelitian.
 4. Wilayah terbangun.
 5. Arah pengembangan fisik kota.
3. Pengumpulan Data Penunjang
- Pengumpulan Data Penunjang melalui penelitian / pengumpulan data di lapangan baik melalui instansi / Dinas maupun Kecamatan di Desa.
- Data penunjang ini meliputi :
- Fasilitas pelayanan umum
 - Fasilitas Kota.
 - Status Tanah
 - Kependudukan

E. METODE ANALISA

Dari Peta dan Data sosial ekonomi diadakan tabulasi data serta korelasi peta dan data. Hasil analisa data dan data sosial ekonomi dapat ditentukan :

1. Arah perkembangan fisik kota.
2. Jumlah penduduk 20 tahun yang akan datang.
3. Kebutuhan ruang untuk kepadatan penduduk 20 tahun yang akan datang.
4. Rekomendasi Batas Wilayah Kota.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM TEHNIS

Dalam rangka Penetapan Batas Wilayah Kota Ambarawa dibentuk Tim Teknis Penetapan Batas Wilayah Kota dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 136 / 916 / 1987 tanggal 4 Agustus 1987.

Adapun susunan anggota Tim Teknis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Wilayah / Daerah selaku Ketua.
2. Kepala Bagian Pemerintah Umum selaku anggota.
3. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda selaku anggota.
4. Kepala Seksi Tata Guna Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang selaku Anggota.
5. Camat Kepala Wilayah masing - masing Kecamatan yang ditetapkan Batas Wilayah Kotanya selaku Anggota.

Tugas Tim Teknis tersebut adalah :

1. Melaksanakan penelitian dalam rangka menetapkan Batas Wilayah Kota di Kabupaten Dati II Semarang
2. Mengkoordinasikan kegiatan tim secara vertikal dan horisontal dengan instansi vertikal tingkat Kabupaten.

Tim Teknis tersebut bertanggung jawab langsung pada Bupati Kepala daerah Tingkat II Semarang.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Tingkat II mendapat bimbingan dari Tim Teknis Tingkat I yang beranggotakan dari :

- Unsur Bappeda Tingkat I
- Unsur Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
- Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
- Unsur Biro Bina Pemerataan Umum Sekwilda Tingkat II

Disamping itu juga dibantu oleh suatu Tim Administrasi yang beranggotakan dari :

- Unsur Subag Perkotaan Bagian Tata Pemerintahan.
- Unsur Subag Perundang - undangan Bagian Hukum
- Unsur Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeda
- Unsur Seksi Tata Guna Tanah Kantor Pertanahan.

BAB III

KEADAAN UMUM WILAYAH PENGAMATAN

Kecamatan Ambarawa merupakan salah satu kecamatan yang terletak di sebelah Barat Daya Ungaran. Dalam Wilayah ini dilalui jalan Negara yang menghubungkan antara Kota Semarang / Ungaran dengan Kota Magelang / Yogyakarta.

Luas wilayah Kecamatan Ambarawa adalah 5,930,95 Ha dan mempunyai ketinggian antara 475 m - 975 diatas permukaan laut.

Secara administrasi Kecamatan Ambarawa mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebalah Utara : Kecamatan Klepu
- Sebalah Timur : Kecamatan Bawen
- Sebalah Barat : Kecamatan Jambu
- Sebalah Selatan : Kecamatan Banyubiru

Kecamatan Ambarawa terdiri dari 6 Kelurahan dan 10 Desa yang secara terperinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 1 : Nama Desa / Kelurahan dan Luas Wilayah

NO.	DESA / KELURAHAN	LUAS (HA)
1.	Kupang	234,00
2.	Lodoyong	148,20
3.	Kranggan	29,20
4.	Panjang	258,00
5.	Ngampin	360,00
6.	Pojoksari	162,00
7.	Baran	174,00
8.	Jetis	264,00
9.	Milir	319,50
10.	Duren	243,90
11.	Kenteng	357,00
12.	Candi	1028,29
13.	Pasekan	753,587
14.	Tambakboyo	189,00
15.	Bejalen	470,720
16.	Bandungan	434,35
Jumlah		5,430,95

Sumber Data : Monografi Desa

A. PENETAPAN WILAYAH PENGAMATAN

Berdasarkan pola penggunaan tanah dan keadaan fisik dasar kota sifat urban kota AMbarawa meliputi 6 Kelurahan, yaitu :

- Kelurahan Kupang ;
- Kelurahan Lodoyong;
- Kelurahan Kranggan;
- Kelurahan Panjang;
- Kelurahan Ngampin;
- Kelurahan Pojoksari ;

Selain itu terdapat 4 Desa yang diperkirakan mempunyai kecenderungan sebagai daerah pengembangan Kota Ambarawa yaitu :

- Desa Baran
- Desa Jetis
- Desa Milir
- Desa Duren

Dengan demikian dalam penelitian batas wilayah kota Kecamatan Ambarawa ini akan diadakan pengamatan pada wilayah 10 Desa / Kelurahan tersebut.

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran umum wilayah pengamatan dapat dilihat pada Peta No. 1.

B. FAKTA FISIK

1. Letak Geografi

Kota Kecamatan Ambarawa selain sebagai Kota Kecamatan juga sebagai kota tempat kedudukan Pembantu Bupati Semarang Wilayah Ambarawa.

Wilayah pengamatan Kota Ambarawa berdasarkan perhitungan planimeter memiliki luas wilayah $\pm 2.193,00$ Ha dan terletak pada $110^{\circ}22'0,9'' - 110^{\circ}24'57,9''$ Bujur Timur & $7^{\circ}12'30,82'' - 7^{\circ}17'2,95''$ Lintang Selatan.

Wilayah pengamatan mempunyai posisi yang cukup strategis karena dilalui jalan negara yang menghubungkan kota Semarang atau kota Ungaran dengan kota Magelang atau kota Yogyakarta.

Hal ini sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan lalu lintas perekonomian, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan kota Ambarawa.

2. Topografi

a. Untuk mengamati kondisi topografi wilayah pengamatan dapat dilihat dari klasifikasi wilayah tanah usaha, yaitu :

- 1). Klasifikasi terbatas 1 dengan ketinggian 0 - 7 m di atas permukaan air laut.
- 2). Klasifikasi utama 1 dengan ketinggian 7 - 500 m di atas permukaan air laut yang terperinci dalam :
 - Utama 1a : 7 - 15 m diatas permukaan air laut ;
 - Utama 1b : 15 - 25 m diatas permukaan air laut;
 - Utama 1c : 25 - 100 m diatas permukaan air laut;
 - Utama 1d : 100 - 500 m diatas permukaan air laut;

3). Klasifikasi utama 2 ketinggian 500 - 1000 m dari permukaan air laut.

4). Klasifikasi terbatas 2 ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan air laut.

b. Keadaan topografi wilayah pengamatan merupakan daerah yang miring dan berada pada ketinggian antara ± 475 m - 975 m diatas permukaan laut.

Apabila dilihat dari klasifikasi penggolongan wilayah tanah usaha maka wilayah pengamatan termasuk dalam klasifikasi sebagai berikut :

- 1). Wilayah utama 1a yang meliputi Kelurahan Ngampin, Panjang, Lodoyong, Kupang, Pojoksari, dan Kranggan pada wilayah ini permukaan tanahnya datar sampai miring dan penggunaan tanahnya berupa sawah dengan tingkat produktivitas tinggi.
- 2). Wilayah utama 2 yang meliputi Desa Baran, Duren, Jetis dan Milir. Pada wilayah ini permukaan tanahnya miring dan penggunaan tanahnya berupa padi, palawija, dan tanaman keras dengan produktivitas lahan yang lebih dibanding wilayah utama 1d.
- 3). Kualitas Medan

Wilayah pengamatan terletak di kaki Gunung Ungaran sehingga sebagian besar permukaan tanahnya miring, secara garis besar keadaan medan wilayah pengamatan dapat digolongkan menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah sebelah utara dan wilayah sebelah selatan dari jalan raya Bawen - Magelang.

- a. Untuk wilayah sebelah utara pada umumnya mempunyai permukaan tanah yang miring, terutama di Desa Duren dan Jetis. Tempat-tempat yang berlereng curam relatif tidak banyak, yaitu hanya daerah tepi kali panjang di wilayah Desa Baran dan Desa Jetis maupun daerah tepi kali Ngampin bagian Utara. Pada wilayah bagian utara ini banyak terdapat batu pada permukaan tanahnya.
- b. Untuk wilayah sebelah selatan pada umumnya mempunyai permukaan tanah yang datar sampai landai. Pada wilayah ini terutama daerah kelurahan Pojoksari, Lodoyong dan Ngampin yang berada dekat Rawa Pening, secara periodik merupakan daerah banjir luapan dari Rawa Pening. Untuk melihat secara jelas penyebaran tempat-tempat yang berlereng curam dan daerah banjir dapat dilihat pada peta No. 3

4). Pola Aliran Sungai

Pada wilayah pengamatan terdapat 3 buah sungai yang cukup besar dan sepanjang tahun tidak pernah mengalami kering, yaitu sungai Pajang, Sungai Kupang dan Sungai Rengas.

Ketiga Sungai tersebut mengalir melewati beberapa Desa/Kelurahan dan bermuara di Rowo Pening.

Oleh karena ketiga sungai tersebut tidak pernah mengalami kekeringan maka dimanfaatkan untuk mengairi sawah, baik secara teknis, setengah teknis maupun sederhana. Adapun daerah irigasi dari ketiga sungai tersebut adalah :

- a. Daerah Irigasi Kali panjang meliputi Desa / Kelurahan Panjang, Pojoksari, Ngampin Selatan, dan Lodoyong.
- b. Daerah Irigasi Kali Kupang meliputi Desa / Kelurahan Milir, Jetis, Baran, Kranggan dan Kupang.
- c. Daerah Irigasi Kali Rengas berada diluas wilayah pengamatan.

5. Kesuburan Tanah.

Penggunaan tanah untuk pertanian pada wilayah yang belum terbangun secara umum dapat dikelompokkan dalam 2 golongan, yaitu : wilayah sebelah utara dan wilayah sebelah selatan dari jalan raya Bawen - Magelang.

- a. Penggunaan tanah untuk wilayah sebelah utara pada umumnya berupa sawah, tegalan, dan kebun capur dengan tingkat kesuburan tanah klasifikasi kurang sampai sedang. Produktivitas tanah sawah untuk 1 tahun masa panen adalah 1 kali panen padi dan 1 kali panen palawija / bunga - bunga. Untuk tanah tegalan pada umumnya ditanami ketela pohon, ketela rambat, dan sayuran, sedangkan kebun campuran umumnya ditanami nangka, kelengkeng, cengkeh dan pisang.
- b. Penggunaan tanah untuk wilayah sebelah selatan pada umumnya berupa sawah dengan tingkat kesuburan tanah klasifikasi tinggi. Produktivitas tanah sawah untuk 1 tahun masa panen adalah 2 kali panen padi. Hal ini karena sebagian besar mendapat pengairan teknis dari Kali panjang.
Untuk melihat lebih jelas tentang kesuburan tanah dan penggunaan tanah di wilayah pengamatan dapat dilihat pada peta No. 3

C. POLA PENGGUNAAN TANAH

Penggunaan tanah di wilayah pengamatan secara garis besar di golongan kedalam 2 wilayah Terbangun dan Wilayah Belum Terbangun. Secara terperinci luas wilayah Terbangun dan Wilayah Belum Terbangun berdasarkan hasil perhitungan Planimeter untuk masing - masing Kelurahan / Desa dalam wilayah Pengamatan dapat dilihat pada tabel No. 2 dibawah ini.

TABEL NO. 2: Luas Wilayah Terbangun dan Belum Terbangun dalam Wilayah Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan Ambarawa.

NO.	KELURAHAN DESA	LUAS (HA)	WILAYAH TERBANGUN		WILAYAH BELUM TERBANGUN	
			LUAS (HA)	%	LUAS (HA)	%
1.	Kupang	234,00	130,40	55,73	103,60	44,27
2.	Lodoyong	148,20	87,20	58,84	61,00	41,16
3.	Kranggan	29,20	21,20	73,97	7,60	26,03
4.	Panjang	258,00	103,20	40,00	154,80	60,00
5.	Ngapin	360,20	78,00	21,65	282,20	78,35
6.	Pojoksari	162,00	28,40	17,53	133,60	82,47
7.	BAran	174,00	38,00	21,84	136,00	78,16
8.	Jetis	264,00	52,40	19,85	211,60	80,15
9.	Milir	319,00	62,60	19,59	256,90	80,41
10.	Duren	243,00	51,80	21,24	192,10	78,76
		2.193,00	653,60	29,80	1.539,40	70,20

Sumber : Hasil Pengukuran Planimeter

1. Wilayah Terbangun

Wilayah Terbangun adalah wilayah yang telah diusahakan untuk usaha non pertanian. Dari pengamatan langsung pada wilayah terbangun terutama untuk daerah pengamatan yang masih berstatus Desa Pada umumnya merupakan pusat pemukiman penduduk. Sedangkan untuk wilayah pengamatan yang sudah berstatus kelurahan disamping bangunan perumahan sebagai tempat tinggal penduduk juga terdapat bangunan untuk perdagangan, perkantoran dan tempat - tempat penting lainnya. Dilihat dari penggunaan tanahnya maka untuk Kelurahan Panjang, Lodoyong, Kranggan dan Kupang disamping sebagai pusat perdagangan juga sebagai pusat kota kecamatan mengingat bangunan fasilitas sosial ekonomi dan perumahan lebih banyak dibanding daerah sekitarnya.

Perincian penggunaan tanah wilayah terbangun dapat dilihat sebagaimana tabel 3.

TABEL NO. 3 : Penggunaan Tanah Wilayah Terbangun dalam wilayah Pengamatan Batas Wilayah Kota Kecamatan Ambarawa.

NO.	KELURAHAN DESA	LUAS DAN HA	PENGUNAAN TANAH					
			PEMUKIMAN		JASA		PERUSAHAAN	
			HA	%	HA	%	HA	%
1.	Kupang	130,40	119,10	91,33	4,30	3,30	7,30	5,37
2.	Lodoyong	87,20	76,50	87,73	6,20	7,11	4,50	5,16
3.	Kranggan	21,60	17,37	80,42	1,40	6,48	2,83	13,10
4.	Panjang	103,20	84,60	81,98	13,90	13,47	4,70	4,55
5.	Ngampin	78,00	76,48	98,05	0,92	1,18	0,60	0,77
6.	Pojoksari	28,40	27,50	96,83	0,47	1,66	0,43	1,51
7.	Baran	38,00	35,80	94,21	2,20	5,79	-	-
8.	Jetis	52,40	51,10	97,52	1,30	2,48	-	-
9.	Milir	62,60	61,40	98,08	1,20	1,92	-	-
10.	Duren	51,80	51,30	99,03	0,50	0,97	-	-
		653,60	601,15	91,97	32,39	4,96	02,06	3,07

Sumber : Hasil Pengukuran Planimeter

Keterangan : Pemukiman meliputi lapangan, kuburan, Emplasemen
Jasa meliputi Kantor Pemerintah, Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas dan tempat ibadah
Perusahaan meliputi Pasar, Toko, Gudang, Terminal Stasiun

Selanjutnya apabila dilihat dari tingkat kerapatan bangunan maka untuk kelurahan Kranggan mempunyai kerapatan bangunan tertinggi yakni 30 rumah (bangunan)/Ha. sedang kerapatan bangunan yang terendah adalah Kelurahan Ngampin dan Desa Jetis

yaitu 10 rumah (Bangunan) / Ha. Secara terperinci jumlah bangunan kerapatannya dapat dilihat pada tabel 3 sedang penyebaran kualitas bangunan dapat dilihat pada peta No 4

TABEL NO. 4 : Jumlah Bangunan dan Kerapatan Bangunan

NO.	KELURAHAN DAN DESA	BANGUNAN						
		PERMANEN		SEMI PERMANEN		NON PERMANEN		TOTAL
		BANGU NAN	KERA- PATAN	BANGU NAN	KERA- PATAN	BANGU NAN	KERA- PATAN	
1.	Kupang	601	5	1.057	8	149	1.807	14
2.	Lodayong	553	6	535	6	64	1.152	13
3.	Kranggan	376	17	166	8	100	642	30
4.	Panjang	422	4	773	7	103	1.298	13
5.	Ngampin	186	2	511	7	85	782	10
6.	Pojoksari	54	2	201	7	275	530	19
7.	Baran	121	3	280	7	250	651	17
8.	Jetis	175	3	332	6	65	572	10
9.	Milir	80	1	697	11	98	875	14
10.	Duren	264	5	522	10	84	870	17

Sumber : Monografi Kelurahan / Desa Tahun 1988

Keterangan : 1. Luas Desa terbangun hasil pengukuran Planimeter
2. Kerapatan adalah jumlah bangunan persatuan luas wilayah terbangun dalam Ha.

2. Wilayah Belum Terbangun

Wilayah belum terbangun adalah wilayah yang diusahakan untuk pertanian. Penggunaan tanah pada wilayah belum terbangun yang berada di bagian selatan dari jalan Raya Bawen - Magelang pada umumnya merupakan daerah persawahan subur, yang sebagian besar dapat ditanami padi 2 kali dalam setahun. Sedangkan untuk wilayah belum terbangun yang berada di bagian Utara Jalan Bawen - Magelang. Pada umumnya berupa sawah, tegalan dan kebun campuran. Secara terperinci penggunaan tanah pada wilayah yang belum terbangun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL NO. 5 : Penggunaan tanah Wilayah Belum Terbangun.

NO.	KELURAHAN DAN DESA	LUAS WILAYAH BELUM TERBANGUN (HA)	PENGUNAAN TANAH					
			SAWAH		TEGALAN		KEBUN CAMPURAN	
			Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	Kupang	103,60	103,60	100	-	-	-	-
2.	Lodoyong	61,00	61,00	100	-	-	-	-
3.	Kranggan	7,60	6,10	80,26	1,50	19,74	-	-
4.	Panjang	154,80	125,50	81,07	29,30	18,93	-	-
5.	Ngampin	282,20	209,00	74,06	73,30	25,94	-	-
6.	Pojoksari	133,60	133,60	100,00	-	-	-	-
7.	Baran	136,06	114,20	83,97	2,80	2,06	19,00	13,97
8.	Jetis	211,60	181,20	85,63	1,60	0,76	28,80	13,61
9.	Milir	256,90	221,70	86,30	35,20	13,70	-	-
10.	Duren	192,10	124,30	64,70	37,40	19,47	30,40	15,83
Jumlah		1.539,40	1.280,20	83,16	181,00	11,76	78,20	5,08

Penyebaran Penggunaan Tanah pada wilayah terbangun dan wilayah yang belum terbangun dapat dilihat pada peta No. 5 (Peta Wilayah Terbangun)

D. JARINGAN JALAN DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM

1. Jaringan Jalan

Sebagaimana dikemukakan pada bagian depan bahwa pada wilayah pengamatan dilalui oleh jalan Negara yang menghubungkan Kota Semarang dan kota Magelang. Disamping itu juga jalan Kabupaten yang menghubungkan Kota Salatiga dan Bandungan Ke 4 (empat) jalur jalan tersebut merupakan jalan utama di dalam wilayah pengamatan dan merupakan Urat Nadi dalam memperlancar arus perekonomian serta mobilitas penduduk dari dan ke wilayah pengamatan. Sebagai daerah yang selalu padat dengan arus lalu lintas antar kota maupun lokal, maka disediakan Terminal Bus antar kota, yang terletak di Kelurahan Panjang dan Terminal Colt yang terletak di Kelurahan Kupang.

Selain ke 4 (empat) jalan - jalan utama seperti tersebut diatas, maka sebagai penghubung antara daerah satu dengan yang lain dalam wilayah pengamatan dihubungkan dengan jalan Kabupaten maupun jalan Desa yang sebagian besar sudah berkwalitas Aspal atau jalan beton, terutama pada wilayah pengamatan yang sudah berstatus Kelurahan. Sedang untuk wilayah pengamatan yang masih berstatus Desa umumnya keadaan jalan dalam perkampungan telah diperkeras Batu dan di luar perkampungan masih berupa jalan tanah.

Disamping jalan Negara, Kabupaten, dan desa juga ada jalan yang dikelola / perumahan Yon Kavaleri di Kelurahan Panjang dan Pojoksari. Secara terperinci kualitas dan status jalan masing - masing kelurahan dan Desa dalam wilayah pengamatan dapat dilihat pada Tabel Nomor 6 di bawah ini.

Tabel 6 : Kwalita dan Status jalan di tiap - tiap Kelurahan dan Desa dalam wilayah Pengamatan

NO.	KELURAHAN DESA	NEGARA	KAB.	D E S A			HANKAM		PANJANG JALAN (m)
		Aspal (m)	Aspal (m)	Aspal (m)	Batu (m)	Tanah (m)	Aspal (m)	Batu (m)	
1.	Kupang	1.885	1.810	815	3.345	9.485	-	-	17.290
2	Lodoyong	150	5.440	40	2.253	2.878	815	140	11.716
3	Kranggan	235	1.325	-	1.220	80	-	-	2.860
4	Panjang	1.153	2.087	125	5.062	6.822	725	475	16.442
5	Ngampin	1.268	-	-	5.003	3.864	-	-	10.135
6	Pojoksari	-	1.775	-	2.452	3.025	-	-	7.252
7	Baran	-	2.150	2.850	2.215	3.450	-	-	10.865
8	Jetis	-	3.175	7.055	1.225	630	-	-	12.115
9	Milir	-	-	10.460	2.330	2.055	-	-	14.845
10	Duren	-	1.000	22.695	6.450	4.750	-	-	13.550
		4.661	18.762	22.695	31.019	37.019	1.540	615	116.877

Sumber : Hasil Pengukuran Curvemeter

2. Fasilitas Pelayanan Umum

Seerti pada umumnya kota - kota lain, kota disamping berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi daerah sekitarnya, juga diharapkan pula beberapa dalam memberikan pelayanan bagi penduduk warga kota itu sendiri maupun penduduk di daerah sekitarnya. Demikian pula halnya untuk kota Kecamatan Ambarawa, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan pada masyarakat telah dibangun beberapa macam fasilitas untuk pelayanan umum antara lain :

- Fasilitas Pendidikan
- Fasilitas Kesehatan
- Fasilitas Peribadatan
- Fasilitas Perkantoran
- Fasilitas Olah raga dan Rekreasi
- Fasilitas Perdagangan

a. Fasilitas Pendidikan.

Fasilitas pendidikan yang terdapat pada wilayah pengamatan mulai dari Tingkat kanak-kanak sampai dengan Tingkat SLTA. Tingkat TK dan SD serta yang sederajat tersebar hampir di seluruh pengamatan, sedang untuk tingkat SLTP dan SLTA serta yang sederajat baik yang berstatus Negeri maupun Swasta terdapat di 3 wilayah yaitu Kelurahan Panjang, Kupang dan Lodoyong.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah sekolah dan murid pada masing-masing Kelurahan / Desa dalam wilayah pengamatan dapat dilihat pada Tabel No. 7 di bawah ini.

TABEL No. 7 : Jumlah Sekolah dan Murid yang ada dalam wilayah Pengamatan.

NO.	KELURAHAN DESA	TK		SD		MADRASAH		SLTP		SLTA	
		Sekolah (buah)	Murid	Sekolah (buah)	Murid	Sekolah (buah)	Murid	Sekolah (buah)	Murid	Sekolah (buah)	Murid
1.	Kupang	3	270	5	595	-	-	2	225	2	310
2.	Lodoyong	3	316	6	642	1 1)	50	4	355	2	370
3.	Kranggan	3	160	3	441	1 1)	90	2	611	1	107
4.	Panjang	5	643	7	1772	1 1)	136	3	1635	4	1087
5.	Ngampin	1	55	3	476	1 2)	45	1	323	-	-
6.	Pajoksari	1	43	2	267	-	-	-	-	-	-
7.	Baran	2	120	2	418	1 1)	108	1	360	-	-
8.	Jetis	2	114	2	280	1 1+2)	287	-	-	-	-
9.	Millir	1	58	2	431	1 1)	232	1	49	-	-
10.	Duren	2	135	2	495	1 1)	197	-	-	-	-
Jumlah		23	1914	34	5817	9	1145	14	3558	9	1874

Sumber : Monografi Kelurahan / Desa dalam wilayah Pengamatan Tahun 1988.

Keterangan :

- 1). Ibtidaiyah
- 2). Sanawiyah

b. Fasilitas Kesehatan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan di bidang kesehatan maka dalam wilayah pengamatan telah disediakan beberapa macam Fasilitas Kesehatan diantaranya sebuah Rumah Sakit Umum yang dikelola oleh Pemerintah dengan kapasitas + 200 tempat tidur (Kategori kelas C) yang terletak di Kelurahan Lodoyong. Keberadaan Rumah Sakit Umum tersebut meskipun masih termasuk klasifikasi C namun mempunyai arti yang sangat penting, mengingat jangkauan pelayanan meliputi Kecamatan Sumowono, Kecamatan Jambu, Kecamatan Beringin, dan Kecamatan Bawen yang keseluruhannya itu masih termasuk wilayah Kabupaten Semarang. Disamping Rumah Sakit Umum, terdapat pula Puskesmas, BKIA, Poliklinik, Rumah Bersalin, Apotik, Dokter dan lain sebagainya. Secara terperinci mengenai jumlah fasilitas Kesehatan, Tenaga Medis, dan Paramedis dalam wilayah pengamatan dapat dilihat pada Tabel 8.

TABEL NO. 8 : Jumlah Fasilitas Kesehatan, Tenaga Medis dan Para Medis di Wilayah Pengamatan Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan Ambarawa.

NO.	KELURAHAN DESA	R.S.U (buah)	R.S. Bersalin (buah)	PUS KES MAS	BKIA	POLI KLI NIK	BIDAN PERA- WAT	DOKTER	APOTIK
1.	Kupang	-	-	1	1	-	-	1	1
2.	Lodoyong	1	1	-	1	-	1/7	-	-
3.	Kranggan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Panjang	-	-	-	-	1	3/8	6	-
5.	Ngampin	-	-	1	-	-	-/6	-	-
6.	Pajoksari	-	-	-	-	-	1/15	-	-
7.	Baran	-	-	-	-	1	-/1	-	-
8.	Jetis	-	-	-	-	-	4/-	-	-
9.	Milir	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Duren	-	-	-	-	-	-/2	1	-
Jumlah		1	1	2	2	2	9/38	8	1

Sumber : Monografi Kelurahan dan Desa Dalam Wilayah Pengamatan

c. Fasilitas Peribadatan.

Kota Ambarawa sebagai bekas kota peninggalan jaman penjajahan Belanda yang berfungsi sebagai camp pertahanan tentara Belanda, maka pengaruh Agama Kristen sangat kuat, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya bangunan peninggalan yang berupa Gereja-gereja yang terletak di pinggir jalan utama.

Disamping itu karena kota Ambarawa juga merupakan pusat pertemuan para pedagang dari luar daerah, yang kebanyakan merupakan Warga Negara keturunan Cina yang kemudian setelah kemerdekaan bertempat tinggal di Ambarawa, maka guna melaksanakan ibadatnya sesuai dengan warisan leluhur mereka membangun Pura ataupun Klenteng di Baran, Kel. Kranggan dan Kel. Ngampin namun pemeluknya yang terbanyak berada di Kelurahan Panjang. Sedangkan untuk penduduk asli umumnya

mereka beragama Islam yang tersebar di seluruh wilayah pengamatan.

Dengan demikian secara umum untuk wilayah pengamatan ada 4 macam sarana peribadatan yang tersedia. Perincian tempat ibadah yang ada dalam wilayah pengamatan dapat dilihat pada tabel NO. 9 berikut ini :

TABEL NO. 9 : Jumlah Tempat Ibadah yang ada dalam wilayah Pengamatan

NO.	KELURAHAN DESA	MASJID (buah)	MUSHOLA (buah)	GEREJA (buah)	KLENTENG (buah)	PURA (buah)	JUMLAH (buah)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kupang	20	1	1	-	-	22
2.	Lodoyong	4	4	4	-	-	12
3.	Kranggan	1	4	1	1	-	7
4.	Panjang	1	15	2	-	-	18
5.	Ngampin	2	9	1	1	-	13
6.	Pajoksari	3	4	-	-	-	7
7.	Baran	6	12	-	-	1	19
8.	Jetis	4	8	-	-	-	12
9.	Milir	6	16	-	-	-	22
10.	Duren	5	24	-	-	-	29
Jumlah		52	97	9	2	1	161

Sumber : Data Monografi Kelurahan dan Desa dalam Wilayah Pengamatan.

Sedangkan untuk jumlah pemeluk masing-masing agama dalam wilayah pengamatan adalah sebagaimana Tabel NO. 10 di bawah ini.

TABEL NO. 110 : Jumlah Pemeluk masing-masing Agama dalam Wilayah Pengamatan.

NO.	KELURAHAN DESA	ISLAM (orang)	KATHOLIK (orang)	PROTESTAN (orang)	BUDHA (orang)	HINDU (orang)	JUMLAH (orang)
1.	Kupang	9114	1361	1372	10	-	11857
2.	Lodoyong	3320	1838	832	68	-	6058
3.	Kranggan	2647	312	267	3	2	3231
4.	Panjang	5058	1829	743	43	70	7743
5.	Ngampin	3427	341	258	-	18	4044
6.	Pajoksari	2271	270	75	-	-	2616
7.	Baran	3925	41	9	-	2	3977
8.	Jetis	3101	8	-	-	-	3109
9.	Milir	4052	7	4	8	77	4148
10.	Duren	3765	26	17	-	-	3808
Jumlah		40680	6033	3577	132	169	50591

Sumber Data : Data Monografi Kelurahan & Desa Wilayah Pengamatan Dari Tabel 10 ternyata Islam masih menempati angka tertinggi data wilayah pengamatan (+ 80,41 % dari jumlah penduduk).

d. Fasilitas Perkantoran.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi bidang - bidang ketentraman dan ketertiban, koordinasi, pengawasan dan urusan pelayanan kota, maka pada wilayah pengamatan banyak terdapat kantor - kantor Pemerintah yang tersebar dalam wilayah kota, khususnya di wilayah pengamatan banyak yang sudah berstatus kelurahan seperti : Kantor Pembantu Bupati untuk wilayah Ambarawa, Kantor Polisi, Koramil, Kantor CPM, Bank, Dinas P & K, KUA, BUUD / KUD, Kantor Pos, Kantor Telepon, Kantor Kejaksaan Negeri, PDAM, DPU, Sosial dan PLN, yang secara Keseluruhan letak penyebarannya dapat dilihat pada peta no. 1.

e. Fasilitas Olah raga dan Rekreasi

Untuk memenuhi kebutuhan berolah raga dan tempat hiburan bagi masyarakat Kota dan sekitarnya, telah didirikan sarana Olah Raga yang berupa lapangan Tenis di Desa Baran yang meskipun dikelola oleh sebuah Yayasan namun umumnya dapat menggunakan.

Juga lapangan sepak bola yang terletak di Kelurahan Lodoyong dan Fasilitas Olah Raga lain yang hampir tersebar di wilayah pengamatan. Demikian pula untuk sarana Hiburan, antara lain 2 buah gedung Bioskop yang terletak di Kelurahan Lodoyong, Gua Kerep, Monumen Palagan, Museum Kereta Api yang terletak di Kelurahan Panjang dan tempat hiburan / rekreasi lainnya.

f. Fasilitas Perdagangan

Sehubungan dengan sarana transportasi yang memadai dan adanya fasilitas jalan yang menghubungkan ke daerah - daerah terutama ke daerah penghasil produksi pertanian dan kerajinan industri, maka wilayah pengamatan menjadi salah satu pilihan tempat pemasaran produk - produk tersebut dan menjadi titik temu para pedagang dari luar daerah. Guna memwadhahi kegiatan para pedagang tadi, telah dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang 2 buah pasar umum yang bernama Pasar Projo dan Pasar Surabaya, yang keduanya berlokasi di Kelurahan Kupang. Dengan adanya pasar tersebut memberikan pengaruh terhadap penduduk di sekitar untuk membuka usaha di bidang pertokoan, terutama disepanjang kanan kiri jalan utama dalam wilayah Kelurahan Kupang, Kranggan dan Lodoyong.

Disamping ke dua pasar tersebut, juga terdapat pasar yang dikelola oleh Desa antara lain di Kelurahan Ngampin dan Lodoyong walaupun kondisinya belum dibangun secara permanen.

Untuk lebih jelasnya mengenai letak penyebaran pasar, toko, warung, dapat dilihat pada peta 3 yaitu Peta Pola Penggunaan Tanah.

3. Fasilitas Kota.

Dalam rangka memenuhi fasilitas listrik pada wilayah pengamatan, dilayani Perusahaan Listrik Negara, yang pusat kantornya terletak di Kelurahan Panjang. Hampir seluruh wilayah pengamatan telah mendapat fasilitas listrik terutama di wilayah kota seperti Kelurahan Panjang, Kelurahan Lodoyong, Kelurahan Kupang, Kelurahan Kranggan dan Kelurahan Pojoksari.

Demikian pula fasilitas Telepon juga telah dapat menjangkau sebagian besar wilayah pengamatan terutama pada wilayah Kelurahan. Untuk memenuhi air bersih masyarakat dalam wilayah pengamatan, maka untuk wilayah Kelurahan pada umumnya dilayani oleh

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) walaupun kapasitas produksinya belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara optimal bagi masyarakat yang belum terlayani oleh PDAM, terutama daerah luar Kelurahan pada umumnya menggunakan sumur dan mata air guna memenuhi kebutuhan air bersih.

Untuk memperlancar pembuangan air limbah dan air hujan, khususnya dalam wilayah Kelurahan telah dibuatkan saluran pembuangan air yang merupakan riol induk dan tertutup sepanjang kanan kiri jalan Negara mulai dari wilayah Kelurahan Kupang sampai Kelurahan Panjang sebagai pembuangan akhir di Kali Panjang dan Kali Kupang.

Disamping itu juga Riol pada kanan kiri jalan Kabupaten Secara keseluruhan di pusat kota telah tersedia sarana pembuangan air yang cukup baik. Hal ini mengingat Topografi yang agak miring. Pusat Kota Kecamatan Ambarawa apabila pada saat terjadi kelebihan air akibat hujan, tidak menjadikan masalah air cepat berbuah melalui Riol - riol tersebut, sehingga tidak menimbulkan genangan. Genangan air terjadi di daerah persawahan yang berada di sekitar Rawa Pening, namun sebagai akibat perluasan air Rawa Pening. Dalam rangka pengelolaan sampah maka pemerintah daerah telah menyediakan tempat penampungan sampah sementara dan truk - truk sampah yang setiap hari mengangkut dan membuang sampah dari tempat penampungan ke tempat pembuangan akhir sampah yang berada di luar wilayah pengamatan.

Adapun produsen sampah yang terbanyak adalah sampah dari pasar dan pertokoan sedang sampah dari rumah tangga tidak begitu banyak karena umumnya dimusnahkan sendiri dengan cara dibakar atau kompos. Walaupun demikian ada beberapa wilayah pemukiman di pusat kota yang pengelolaan sampahnya dilakukan secara swadaya oleh RT / RW atau LKMD.

E. STATUS TANAH

Dalam wilayah pengamatan banyak dijumpai berbagai macam Hak atas tanah seperti yang dimaksud dalam pasal 16 Undang - undang Pokok Agraria atau UU No. 5 tahun 1960, terutama pada wilayah pengamatan yang sudah berstatus kelurahan. Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang ada sebagian besar berasal dari Hak Barat (Hak Eigendom, Hak Opstal) yang telah dikonversi hal ini mengingat bahwa kota Kecamatan Ambarawa dahulunya sebagai tempat pertahanan dan sekaligus tempat pemukiman bagi orang - orang Belanda.

Sedang untuk wilayah pengamatan yang masih berstatus Desa sebagian besar status tanahnya berupa tanah milik Adat (Yasan) yang belum bersertifikat.

Dalam wilayah pengamatan tidak ada daerah perkebunan, pertanian dan perikanan yang diusahakan secara khusus sehingga tidak terdapat tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU).

Selain tanah - tanah yang sudah berstatus HM, HGB, dan HP ada juga tanah - tanah yang belum dilekati oleh suatu HAK apapun, yaitu disebut dengan Tanah Negara bebas atau lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Tanah GG, biasanya tanah - tanah tersebut letaknya di pinggir sungai dan luasnya relatif sangat kecil / sempit.

Di samping Tanah Negara atau Tanah GG terdapat pula Tanah Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang diantaranya Tanah Bengkok, Tanah Kas Desa, Tanah Bondo Desa, yang secara keseluruhan belum bersertifikat dan ini terdapat diseluruh wilayah pengamatan, baik yang belum maupun yang sudah berstatus Kelurahan.

F. FAKTA KEPENDUDUKAN.

1. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Penduduk dalam wilayah pengamatan, berdasarkan data monografi Desa Kelurahan pada akhir tahun 1988, berjumlah 50.536 jiwa yang terdiri dari 24.510 jiwa laki-laki dan 26.026 jiwa perempuan.

Dadapun laju pertumbuhan penduduk masing-masing Desa dan Kelurahan pada wilayah pengamatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagaimana tabel no. 11 di bawah ini.

TABEL NO. 11 : Jumlah penduduk selama 5 tahun (1984 - 1988) di wilayah Pengamatan.

NO.	DESA KELURAHAN	1984	1985	1986	1987	1988	LAJU PERTUMBUHAN
1.	Kupang	11.419	11.516	11.648	11.728	1.848	0,93
2.	Lodoyong	6.358	6.329	6.210	6.036	6.044	- 1,25
3.	Kranggan	3.396	3.411	3.190	3.217	3.188	- 1,52
4.	Panjang	7.529	7.574	7.624	7.703	7.755	0,75
5.	Ngampin	3.818	3.899	3.964	4.006	4.044	1,45
6.	Pojoksari	2.492	2.561	2.565	2.602	2.616	1,23
7.	Baran	3.900	3.929	3.940	3.960	3.977	0,49
8.	Jetis	2.959	3.006	3.033	3.067	3.109	1,25
9.	Milir	3.973	4.043	4.097	4.181	4.148	1,09
10.	Duren	3.692	3.723	3.751	3.773	3.807	0,77
Jumlah		49.536	49.991	50.002	50.273	50.536	
			0,92	0,02	0,54	0,52	0,50

2. Kepadatan Penduduk

Rata-rata Kepadatan Penduduk pada wilayah Pengamatan per Ha dalam tahun 1988 adalah sebagaimana Tabel No. 12 & 13 di bawah ini.

TABEL NO. 12 : Kepadatan Kotor Penduduk di Tiap Kelurahan dan Desa dalam wilayah Pengamatan Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan Ambarawa dalam Tahun 1988.

NO.	KELURAHAN DESA	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH PENDUDUK JIWA	KEPADATAN KOTOR PENDUDUK JIWA / HA
1.	Kupang	234,00	11.848	51
2.	Lodoyong	148,20	6.044	41
3.	Kranggan	29,20	3.188	109
4.	Panjang	258,00	7.755	30
5.	Ngampin	360,20	4.044	11
6.	Pojoksari	162,00	2.616	16
7.	Baran	174,00	3.977	23
8.	Jetis	264,00	3.109	12
9.	Milir	319,50	4.148	13
10.	Duren	243,90	3.807	16
Jumlah rata-rata kepadatan : 2.193,00 HA : 5036 =				23

TABEL NO. 13 : Kepadatan Bersih Penduduk di Tiap Kelurahan dan desa dalam wilayah Pengamatan Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan Ambarawa dalam Tahun 1988.

NO.	KELURAHAN DESA	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH PENDUDUK JIWA	KEPADATAN KOTOR PENDUDUK JIWA / HA.
1.	Kupang	130,40	11.848	91
2.	Lodoyong	87,20	6.044	69
3.	Kranggan	21,60	3.188	148
4.	Panjang	103,20	7.755	75
5.	Ngampin	78,00	4.044	52
6.	Pojoksari	28,40	2.616	92
7.	Baran	38,00	3.977	105
8.	Jetis	52,40	3.109	59
9.	Millir	62,60	4.148	66
10.	Duren	51,80	3.807	73
Jumlah		653,60	50.536	77

Sumber: Hasil Pengolahan Data Monografi Desa & Kelurahan dalam Wilayah Pengamatan.

Berdasarkan pada Data diatas, maka untuk Kelurahan Kranggan mempunyai Kepadatan penduduk paling tinggi (109 jiwa / ha) dibanding daerah - daerah dalam wilayah pengamatan sedang yang kepadatan penduduknya paling rendah adalah Kelurahan Ngampin (11 jiwa / ha).

Untuk Kelurahan Kranggan, Kupang, Lodoyong dan Panjang mempunyai Kepadatan penduduk relatif tinggi dibanding dengan Kelurahan & Desa lain, hal ini mengingat bahwa empat kelurahan tersebut adalah merupakan pusat kota. Dan akhirnya secara keseluruhan wilayah pengamatan mempunyai kepadatan penduduk rata - rata 23 jiwa / HA dalam tahun 1988.

3. Komposisi Umum Penduduk

Guna mengetahui secara jelas jumlah penduduk yang berusia produktif dan yang non produktif di dalam wilayah pengamatan, terlebih dahulu harus memperinci jumlah penduduk berdasarkan usia. Untuk itu dibawah ini Perincian mengenai jumlah penduduk menurut Usia dan perbandingan Usia Produktif dengan Non Produktif sebagaimana Tabel 14.

Tabel No. 14 : Jumlah Penduduk Kelompok Umur.

NO.	KELURAHAN DESA	JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA										JUMLAH	
		0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 -		
		L	L	L	L	L	L	L	L	L P	L P	L	P
1	Kupang	1074	1605	1639	1396	1315	1054	978	933	940	914	11.848	
2	Lodoyong	651	656	658	669	654	637	616	562	546	395	6.044	
3	Kranggan	190	237	375	334	351	358	351	348	360	304	3.188	
4	Panjang	1043	1158	885	685	807	574	634	590	861	518	7.755	
5	Ngampin	595	644	312	399	367	342	438	385	373	189	4.044	
6	Pojoksari	286	341	336	315	300	294	295	269	147	33	2.616	
7	Baran	399	412	430	441	447	441	415	395	369	228	3.977	
8	Jetis	395	363	337	333	327	337	331	279	267	140	3.109	
9	Milir	525	539	502	456	386	384	473	346	348	189	4.148	
10	Duren	375	359	344	345	343	352	707	492	369	123	3.807	
		5531	6312	5818	5373	5297	4773	5238	4599	4580	3033	50.536	

Sumber : Monografi Kelurahan & Desa Tahun 1988 dalam wilayah Pengamatan

Dari data diatas selanjutnya dapat diketahui perbandingan usia Produktif dengan Usia Non Produktif. Dimana untuk Usia Produktif mengambil batasan usia antara 15 - 59 th, sebagaimana Tabel No. 15 di bawah ini.

TABEL NO. 15 : Perbandingan antara jumlah penduduk usia Produktif.

NO.	KELURAHAN DESA	JUMLAH PENDUDUK			NON PRODUKTIF (0 - 14 th & 60 -)	
		JIWA	JIWA	%	JIWA	%
1.	Kupang	11.848	6.616	55,84	5.232	44,16
2.	Lodayong	8.044	3.684	60,95	2.360	38,05
3.	Kranggan	3.188	2.082	65,31	1.106	34,69
4.	Panjang	7.755	4.151	53,53	3.604	46,47
5.	Ngampin	4.044	2.304	56,97	1.740	43,03
6.	Pajoksari	2.616	1.620	61,93	996	38,07
7.	Baran	3.977	2.508	63,00	1.469	36,94
8.	Jetis	3.109	1.874	60,28	1.235	39,72
9.	Millir	4.148	2.393	57,69	1.755	42,31
10.	Duren	3.807	2.608	68,51	1.199	31,49
Jumlah		50.536	29.840	604,07	20.696	395,93
Rata - rata prosentase				60,41	39,59	

Sumber : Hasil Pengolahan Tabel No. 14

Dilihat dari data diatas, maka untuk Desa Duren menduduki angka prosentase paling tinggi mengenai jumlah penduduk usia produktif yaitu 68,51 % sedangkan yang terendah adalah Kelurahan Panjang yaitu 53,53 %, hal ini disebabkan banyaknya anak - anak di bawah usia dan orang tua lanjut usia yang sebagian besar para pensiunan baik ABRI maupun pegawai Negeri. Keadaan yang demikian adalah cukup potensial untuk digunakan sebagai Modal Dasar Pembangunan yang berupa tersedianya Tenaga Kerja Atau Skill.

4. Mata Pencarian Penduduk.

Sebagai ciri masyarakat kota dalam memenuhi kebutuhan sehari - hari banyak yang bekerja di luar sektor Pertanian. Hal ini mengingat terbatasnya lahan pertanian yang ada, disamping itu Kota merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kota atau diluar kota untuk urbanisasi dalam rangka mencari lapangan kerja baru di luar sektor Pertanian. Mereka mempunyai anggapan dengan lapangan kerja baru dan sekaligus dapat meningkatkan taraf hidupnya, tanpa memandang sisi lain dari kehidupan kota. Demikian pula halnya pada wilayah pengamatan, khususnya untuk wilayah yang sudah berstatus Kelurahan penduduknya banyak yang bekerja dalam bidang Pemerintah, Perdagangan, Kesehatan, Buruh dan Pengangkutan, sedangkan untuk wilayah yang masih berstatus Desa, mata pencarian penduduk pada umumnya bekerja dalam sektor Pertanian, baik petani pemilik, Buruh Tani maupun Nelayan walaupun yang bekerja di sektor lainnya namun jumlahnya relatif sedikit.

Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencarian penduduk dalam wilayah pengamatan dapat dilihat pada Tabel No. 16 berikut ini.

Tabel No. 16 : Mata Pencapaian penduduk tahun 1988

NO.	KELURAHAN DESA	MATA PENCAPAIAN											JUMLAH ORANG
		PERTANIAN			NON PERTANIAN								
1	Kupang	209	306	-	5	205	207	95	16	210/18	224	1.205	2.691
2	Lodoyong	43	106	1	21	92	79	201	61	424/51	320	360	1.759
3	Kranggan	2	9	-	14	41	60	134	40	151/	106	237	794
4	Panjang	219	296	-	9	430	435	137	250	483/322	409	1.255	4.245
5	Ngampin	431	484	-	47	253	329	45	4	106/6	48	347	2.200
6	Pojoksari	317	140	18	2	36	20	6	2	104	72	107	824
7	Baran	451	511	-	2	194	85	23	4	101	26	1.766	3.163
8	Jetis	415	613	-	26	7	48	48	30	10	10	446	1.653
9	Milir	1.864	846	-	-	27	182	83	21	48	7	13	3.091
10	Duren	610	419	-	5	-	351	320	11	79/1	4	332	2.132
Jumlah		4.661	3.730	19	131	1.285	1.769	1.092	439	1707/398	1.226	6.068	22.552
		8.410			14.142								22.552
%		37,29			62,71								100 %

Sumber : Monografi Kelurahan & Desa wilayah Pengamatan Tahun 1988

Secara keseluruhan mata pencaharian penduduk dalam wilayah pengamatan lebih banyak yang bekerja dalam bidang Non Pertanian, terutama bagi penduduk dalam wilayah pusat kota, sedang yang disekitar kota umumnya bekerja dalam bidang pertanian.

Apabila kita perbandingkan antara yang bekerja dalam bidang Non Pertanian dengan yang bekerja di bidang Pertanian adalah 62,71 % di bidang Non Pertanian dan 37,29 % di bidang pertanian.

BAB IV

ANALISA DATA

A. DASAR ANALISA

1. Pengertian Analisa.

Analisa adalah suatu proses pengamatan terhadap aspek - aspek

- Kondisi perkotaan secara umum ;
- Kecenderungan pertumbuhan dan perkembangan kota ;
- Penunjang atau pembatas bagi pertumbuhan dan perkembangan kota ;

Untuk dapat menyusun suatu rencana sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka keluaran dari proses analisa harus memiliki akurasi dan keterpaduan aspek - aspek yang dianalisa. Selain itu pemakaian metode, teknik dan standart perencanaan didalam proses analisa perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah perencanaan.

2. Maksud dan Tujuan.

Sesuai dengan pengertian tersebut diatas, maka maksud dan tujuan analisa adalah :

- Mengidentifikasi fungsi dan peranan kota untuk mengetahui kedudukan dan kemampuan pelayanan lokal maupun regional.
- Mengidentifikasi karakteristik / perwatakan perkembangan yang berkaitan dengan aspek - aspek kependudukan, fisik , sosial dan perkotaan.
- Mengidentifikasi faktor - faktor pertumbuhan dan perkembangan kota, yang meliputi faktor penunjang dan faktor pembatas bagi pertumbuhan dan perkembangan kota.
- Mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kota berdasarkan fungsi dan peranannya, kondisi dan fisik sosial ekonomi dan perwatakan faktor - faktor perkembangan yang ada.

3. Metode Analisa.

- a. Untuk kajian kebijaksanaan dipakai teknik pengumpulan data sekunder yang meliputi laporan - laporan, data dan peraturan yang ada, selain itu dilakukan wawancara dengan pejabat terkait sesuai kebutuhan.
- b. Untuk " **Study Sistem Kegiatan** " digunakan teknik pengumpulan data sekunder dan pengamatan tidak langsung.
- c. Teknik pengumpulan data primer melalui pengamatan langsung dalam survey tata guna tanah, kondisi bangunan dan sirkulasi pergerakan. Analisa yang dilakukan dalam analisa tata guna tanah Exciting dan kecenderungan perkembangannya.
- d. Dalam rangka analisa metode yang dipakai meliputi overlay, tabulasi, konjulasi dan korelasi.

B. ANALISA KEPENDUDUKAN.

1. Proyeksi penduduk sampai 20 tahun mendatang

Jumlah penduduk di wilayah pengamatan pada tahun 1988 adalah sekitar 50.536 jiwa. Sedangkan perkembangan penduduk selama 5 tahun terakhir (1984 - 1988) adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	PERTUMBUHAN	
			JIWA	%
1.	1984	49,536	455	0,92
2.	1985	49,991	11	0,02
3.	1986	50,002	271	0,54
4.	1987	50,273	263	0,52
5.	1988	50,536		0,50
Rata - rata				

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa rata - rata laju pertumbuhan penduduk wilayah pengamatan adalah 0,50 % atau 0,005. Selanjutnya untuk menghitung perkiraan jumlah penduduk 20 tahun yang akan datang digunakan rumus :

$$P_t = P_o (1 + r) t$$

P_t = Perkiraan jumlah penduduk tahun ke tahun

P_o = Jumlah penduduk tahun awal

r = laju pertumbuhan penduduk rata - rata

t = waktu / tahun perkiraan

Selanjutnya dari rumus tersebut dapat dihitung;

$$\begin{aligned} P_{20} &= P_{1988} (1 + r) 20 \\ &= 50536 (1 + 0,005) 20 \\ &= 50536 (1 + 1,005) 20 \\ &= 50536 (1,1048956) \\ &= 55,837 \text{ Jiwa} \end{aligned}$$

2. Kepadatan penduduk

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa kepadatan kotor penduduk di wilayah pengamatan adalah : 50.336 jiwa : 2.193,00 Ha = 23 Jiwa / Ha. Sedangkan kepadatan bersih penduduk di wilayah pengamatan adalah 50.536 jiwa : 653,60 = 77 Jiwa / Ha. Selanjutnya apabila dilihat tingkat kepadatan per desa / kelurahan maka terlihat cukup bervariasi yang paling padat adalah kelurahan Kranggan 109 jiwa / Ha. Kemudian menyusul Kelurahan Kupang 51 Jiwa / Ha, Kelurahan Lodoyong 41 Jiwa / Ha, Kelurahan Pajaksari dan Desa Duren 16 Jiwa / Ha, Desa Millir 13 Jiwa / Ha, Desa Jetis 12 Jiwa / Ha dan Kelurahan Ngampin 11 Jiwa / Ha.

Keadaan ini menunjukkan bahwa pola penyebaran penduduk di wilayah pengamatan tidak merata dengan perbedaan yang agak besar.

3. Komposisi Umum Penduduk

Dari tabel 14 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada usia non produktif, yaitu 60,41 % : 39,59 % keadaan ini menunjukkan bahwa tuntutan penyediaan lapangan kerja menjadi semakin besar, terutama pengembangan sektor - sektor non pertanian seperti sektor jasa dan sektor industri.

4. Mata Pencapaian penduduk

Dari tabel 15 dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di wilayah pengamatan mempunyai mata pencapaian di sektor pertanian (62,71 %) sedangkan di sektor pertanian sekitar 37,29 %.

Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di wilayah pengamatan mempunyai mata pencapaian yang heterogen dan merupakan ciri - ciri masyarakat kota. Selanjutnya apabila dilihat komposisinya pada masing - masing Desa / Kelurahan tampak bahwa sebagian berstatus kelurahan sedangkan yang bekerja di sektor pertanian tinggal di wilayah yang berstatus desa.

C. ANALISA KEBUTUHAN RUANG

1. Kebutuhan Ruang Sampai Tahun 2008

Dari analisa kependudukan dapat diketahui bahwa proyeksi jumlah penduduk wilayah pengamatan sampai tahun 2008 adalah sekitar 55.837 Jiwa.

Apabila kepadatan penduduk kota yang lokal ditetapkan antara 60 - 80 jiwa / ha maka kebutuhan ruang kota kecamatan Ambarawa sampai tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- Kepadatan penduduk 60 jiwa / ha adalah :

$$\frac{55.837}{60}$$

$$= 930,62 \text{ Ha}$$

- Kepadatan penduduk 80 jiwa / Ha adalah :

$$\frac{55.837}{80}$$

$$= 697,96 \text{ Ha}$$

Dengan demikian kebutuhan ruang kota kecamatan Ambarawa berkisar antara 697,96 Ha - 930,62 Ha.

Selanjutnya untuk mengetahui kebutuhan ruang efektif kota kecamatan Ambarawa perlu dianalisa arah perkembangan fisik dan ruang serta keadaan batas alam yang secara fisik dipakai sebagai pedoman batas.

2. Arah Perkembangan Fisik dan Ruang

a. Faktor Pembatas

1). Faktor Fisik

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan peta topografi, maka kondisi wilayah pengamatan dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor pembatas alam yang ada.

Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi pengembangan wilayah kota adalah :

Topografi wilayah, pola aliran sungai dan daya dukung tanah, dimana dalam menentukan wilayah pengembangan kota harus menghindari daerah yang kemiringan tanahnya terjal (lebih dari 40 %) dan menghindari daerah banjir / rawa. Berdasarkan pengamatan dilapangan maka terdapat beberapa lokasi yang tidak memungkinkan untuk perkembangan kota Ambarawa, antara lain sawah beringasiteknis dan daerah banjir disebelah selatan kelurahan Pojoksari, Kupang dan Ngampin. Kemudian daerah yang kemiringan tanahnya curam disebelah utara Kelurahan Ngampin.

2). Faktor Hukum

Faktor pembatas dari aspek hukum adalah adanya tanah - tanah yang secara hukum sulit untuk digunakan oleh pihak lain, misalnya tanah cagar alam, tanah kawasan hutan, dan hak guna usaha.

Berdasarkan data yang ada maka faktor pembatas dari aspek hukum ini tidak begitu berpengaruh. Hal ini karena tidak adanya tanah - tanah seperti tersebut.

b. Faktor penunjang

1). Aksesibilitas, yaitu tingkat kemudahan pencapaian ke suatu wilayah melalui tersedianya jaringan jalan dan transportasi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Ditinjau dari aksesibilitas maka pengembangan kota Ambarawa cenderung mengikuti jalur - jalur transportasi utama kota, yaitu ke arah Barat dan Timur searah dengan jalur jalan Bawen - Magelang. Kemudian ke arah Utara searah dengan jalur jalan Ambarawa - Bandungan dan ke selatan searah jalur jalan Ambarawa - Banyubiru Salatiga.

2). Fasilitas pelayanan umum, yaitu keberadaan fasilitas - fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, fasilitas - kesehatan, fasilitas perdagangan, fasilitas peribadatan dan fasilitas perkantoran, yang kemungkinan dapat menunjang menarik perkembangan kota.

Berdasarkan pengamatan maka keberadaan fasilitas pendidikan dan peribadatan bersifat merata diseluruh wilayah pengamatan. Sedangkan fasilitas lainnya berada di Pusat Kota Ambarawa. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas - fasilitas pelayanan umum di wilayah pengamatan kurang begitu berpengaruh terhadap perkembangan kota.

3). Fasilitas Kota.

Fasilitas kota yang dapat mempengaruhi kota adalah keberadaan beberapa jaringan antara lain :

- Jaringan listrik
- Jaringan telephone
- Jaringan air bersih
- Jaringan pemetaan / riol
- dll.

Berdasarkan pengamatan maka untuk jaringan listrik telah dapat menjangkau seluruh wilayah pengamatan. Demikian pula untuk jaringan telephone. Untuk jaringan pemetaan / Riol juga tidak menjadi masalah karena kondisi alam yang berbukit / miring.

Selanjutnya untuk jaringan air minum juga telah menjangkau sebagian besar penduduk di pusat kota, sedangkan penduduk di daerah pedesaan pada umumnya memanfaatkan sumber mata air, sumur dan sungai.

4). Status Tanah

Pada wilayah pengamatan, khususnya yang berstatus sebagai kelurahan, banyak dijumpai berbagai macam hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Sedang untuk wilayah pengamatan yang masih berstatus Desa pada umumnya status tanahnya berupa tanah Yasan yang belum bersertifikat.

Disamping itu dalam wilayah pengamatan tidak terdapat tanah - tanah yang berstatus sebagai tanah Hak Guna Usaha atau Hak Penguasaan Hutan.

Dengan demikian dilihat dari status tanahnya, tidak begitu berpengaruh terhadap perkembangan kota.

3. Wilayah Pengembangan.

Berdasarkan analisa kebutuhan ruang sampai tahun 2008, arah perkembangan fisik dan ruang serta faktor batas alam yang dapat dipakai sebagai pedoman batas wilayah maka setelah dihitung memakai planimeter pada Peta., Wilayah yang layak untuk ditetapkan ibukota Kecamatan Ambarawa, adalah sebagai berikut :

a. Wilayah yang dibutuhkan untuk pengembangan kota Ambarawa adalah seluas 773,423 Ha, yang meliputi :

- Kelurahan Kupang : 205,37 Ha;
- Kelurahan Lodoyong : 142,15 Ha;
- Kelurahan Kranggan : 29,20 Ha;
- Kelurahan Panjang : 246,15 Ha;
- Kelurahan Pojoksari : 32,66 Ha;
- Kelurahan Ngampin : 117,94 Ha.

b. Wilayah yang dicadangkan untuk pengembangan kota Ambarawa sampai dengan tahun 2008 adalah seluas 160,69 Ha, yang meliputi :

- Kelurahan Kupang : 28,63 Ha;
- Kelurahan Lodoyong : 53,02 Ha;
- Kelurahan Panjang : 11,90 Ha;
- Kelurahan Pojoksari : 23,79 Ha;
- Desa Baran : 43,35 Ha.

c. Dengan demikian wilayah yang direkomendasikan sebagai wilayah Kota Kecamatan Ambarawa adalah seluas 934,12 Ha yang meliputi :

- Kelurahan Kupang : 234,00 Ha;
- Kelurahan Lodoyong : 142,15 Ha;
- Kelurahan Kranggan : 29,20 Ha;
- Kelurahan Panjang : 258,00 Ha;
- Kelurahan Ngampin : 170,97 Ha;
- Kelurahan Pojoksari : 56,45 Ha;
- Desa Baran : 43,35 Ha.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta No. 8

BAB V

KESIMPULAN

Dengan memperhatikan keadaan umum wilayah pengamatan, analisa kependudukan dan analisa kebutuhan ruang maka dapat disampaikan hasil penetapan batas wilayah kota Kecamatan Ambarawa sebagai berikut :

1. Wilayah Administrasi dan fisik kota Ambarawa meliputi wilayah : Kelurahan Kupang, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Panjang, sebagian Kelurahan Lodoyong, sebagian kelurahan Ngampin, sebagian Kelurahan Pojoksari, dan sebagian Desa Baran.
2. Luas Wilayah Kota Kecamatan Ambarawa adalah sekitar 934,11 Ha, yang meliputi :
 - a. Kelurahan Kupang : 234,00 Ha;
 - b. Kelurahan Kranggan : 29,20 Ha;
 - c. Kelurahan Panjang : 258,00 Ha.
 - d. Kelurahan Lodoyong : 142,15 Ha;
 - e. Kelurahan Ngampin : 170,97 Ha;
 - f. Kelurahan Pojoksari : 56,45 Ha;
 - g. Desa Baran : 43,35 Ha
3. Batas - batas wilayah kota Kecamatan Ambarawa adalah :
 - a. Sebelah Utara : Batas Desa Pasekan, Saluran Desa Baran, Batas Kecamatan Bawen
 - b. Sebelah Timur : Kali Rengas, Batas Desa Tambakboyo
 - c. Sebelah Selatan : Batas Desa Bejalen dan jalan batu
 - d. Sebelah Barat : Saluran Irigasi, batas Kecamatan Jambu.
4. Agar tujuan penetapan batas wilayah kota dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan maka perlu kegiatan tidak lanjut antara lain :
 - a. Penetapan hasil penelitian batas wilayah kota dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga memenuhi kekuatan hukum yang kuat dan mengikat.
 - b. Pemasangan / pembuatan tugu batas kota sehingga secara fisik dapat diketahui dengan jelas dan mudah batas - batas wilayah kota Ambarawa.
 - c. Penyusunan dan penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruan Kota (RDTRK), dan Rencana Teknik Tata Ruang Kota (RTRK) sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalain pengembangan fisik Ruang Kota Ambarawa.
 - d. Penyusunan Rencana Pengembangan kota Terpadu dan Pelaksanaannya berbagai Proyek Pembangunan.



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

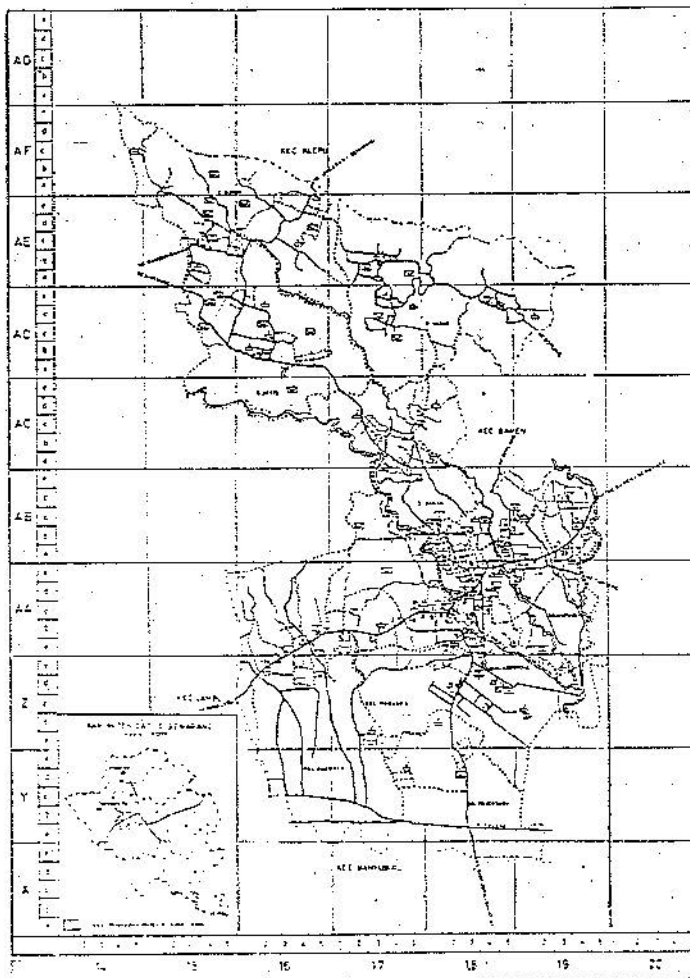
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN AMBARAWA

LAMPIRAN PETA - PETA

1. PENENTUAN WILAYAH PENELITIAN
2. POLA PENGGUNAAN TANAH
3. KONDISI WILAYAH PENELITIAN
4. WILAYAH TERBANGUN
5. ARAH PENGEMBANGAN FISIK KOTA
6. KEBUTUHAN RUANG
7. WILAYAH PENGEMBANGAN
8. WILAYAH KOTA
9. ADMINISTRASI WILAYAH KOTA

TEAM TEKNIS PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG



**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

DI AMBUTIRAN SATYA PRAJA

**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KECAMATAN AMBARAWA**

PETA No. 1

PENENTUAN WILAYAH PENELITIAN

Skala 1 : 20000

10 cm = 2 km

KETERANGAN



Simbol Pemukiman dan Fasilitas

1. Rumah

2. Kantor

3. Sekolah

4. Masjid

5. Stasiun

6. Lapangan

7. Perumahan

8. Jalan

9. Sungai

10. Perkebunan

11. Perikanan

12. Perindustrian

13. Perhubungan

14. Perhubungan

15. Perhubungan

16. Perhubungan

17. Perhubungan

18. Perhubungan

19. Perhubungan

20. Perhubungan

21. Perhubungan

22. Perhubungan

23. Perhubungan

24. Perhubungan

25. Perhubungan

26. Perhubungan

27. Perhubungan

28. Perhubungan

29. Perhubungan

30. Perhubungan

1. Jalan

2. Jalan

3. Jalan

4. Jalan

5. Jalan

6. Jalan

7. Jalan

8. Jalan

9. Jalan

10. Jalan

11. Jalan

12. Jalan

13. Jalan

14. Jalan

15. Jalan

16. Jalan

17. Jalan

18. Jalan

19. Jalan

20. Jalan

21. Jalan

22. Jalan

23. Jalan

24. Jalan

25. Jalan

26. Jalan

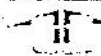
27. Jalan

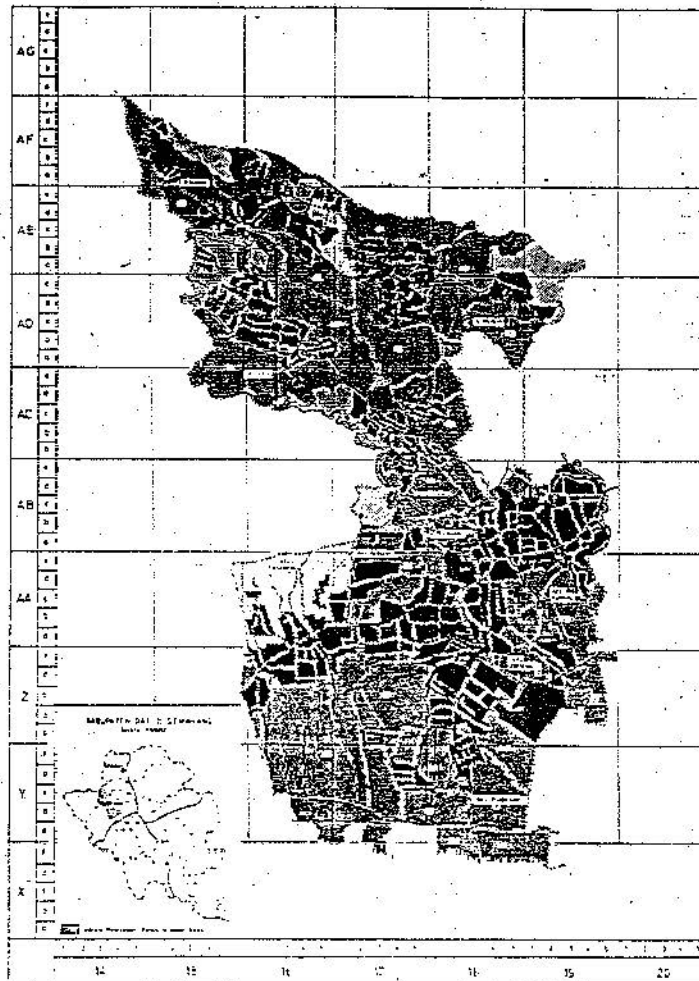
28. Jalan

29. Jalan

30. Jalan

TEKNIK PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG





**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

DIKEMUKAKAN SATYA PRABU

**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KECAMATAN AMBARAWA**

PETA No. 3

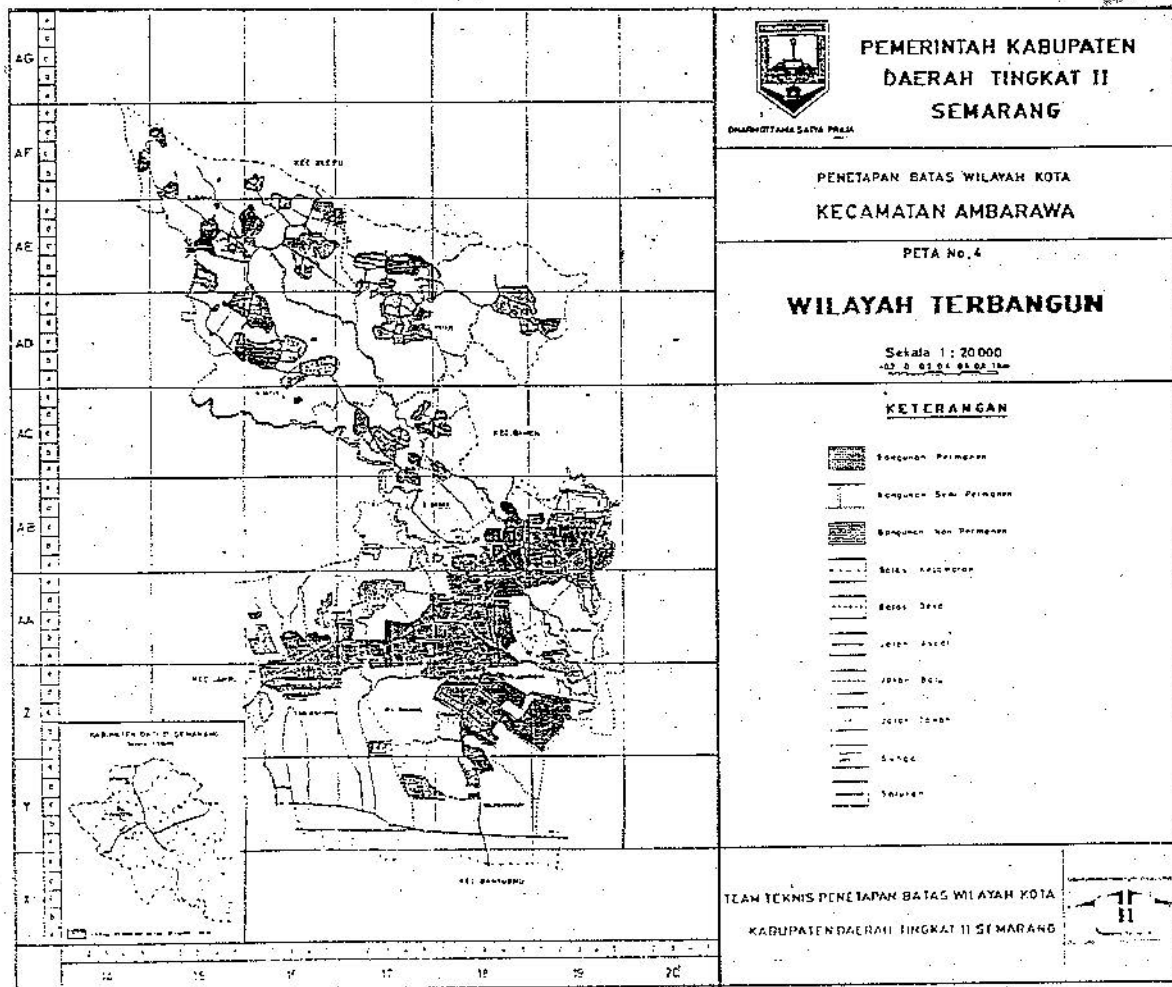
KONDISI WILAYAH PENELITIAN

Sekala 1 : 20 000
-02 0 52 04 05 06 km

- Daerah yang ditetapkan
- Lebar 30 meter sepanjang
- Lebar 15 meter dan 10 meter sepanjang
- Desa
- Kawasan Campuran
- Jalan Aspal
- Jalan Batu
- Jalan Tanah
- Rel Kereta Api
- Saluran
- Sungai
- Danau

TEAM TEKNIS PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG







PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KECAMATAN AMBARAWA

РСТА № 5

ARAH PENGEMBANGAN PISIK KOTA

Skala 1 : 20.000

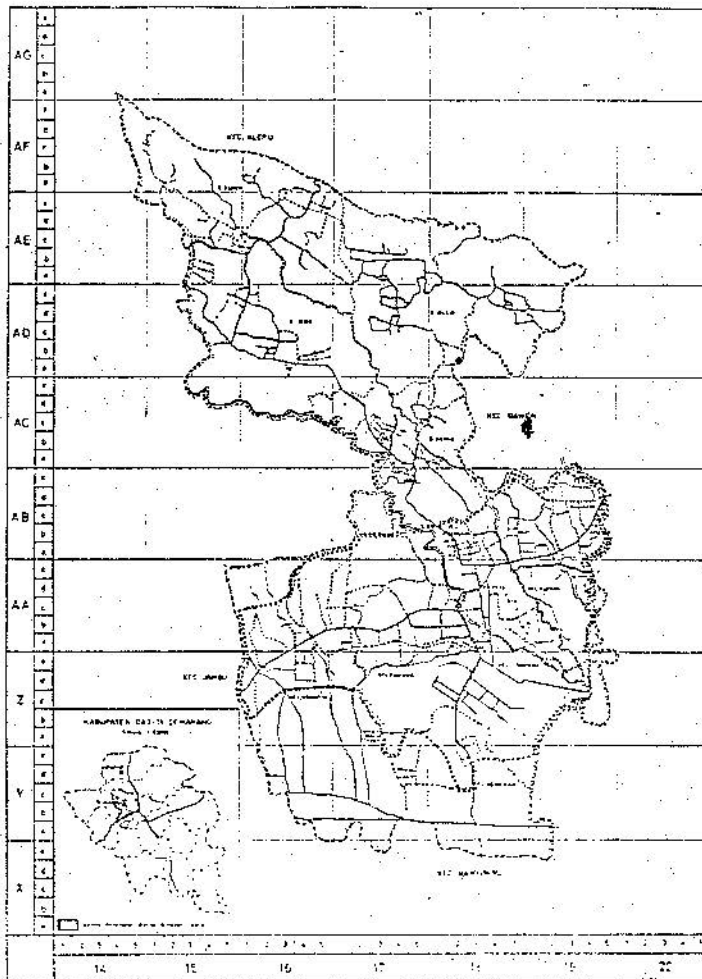
4-82 0 02 02 00 02 00

KETERANGAN



KECAMATAN PERETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG





**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KECAMATAN AMBARAWA**

PETA No. 6

KEBUTUHAN RUANG

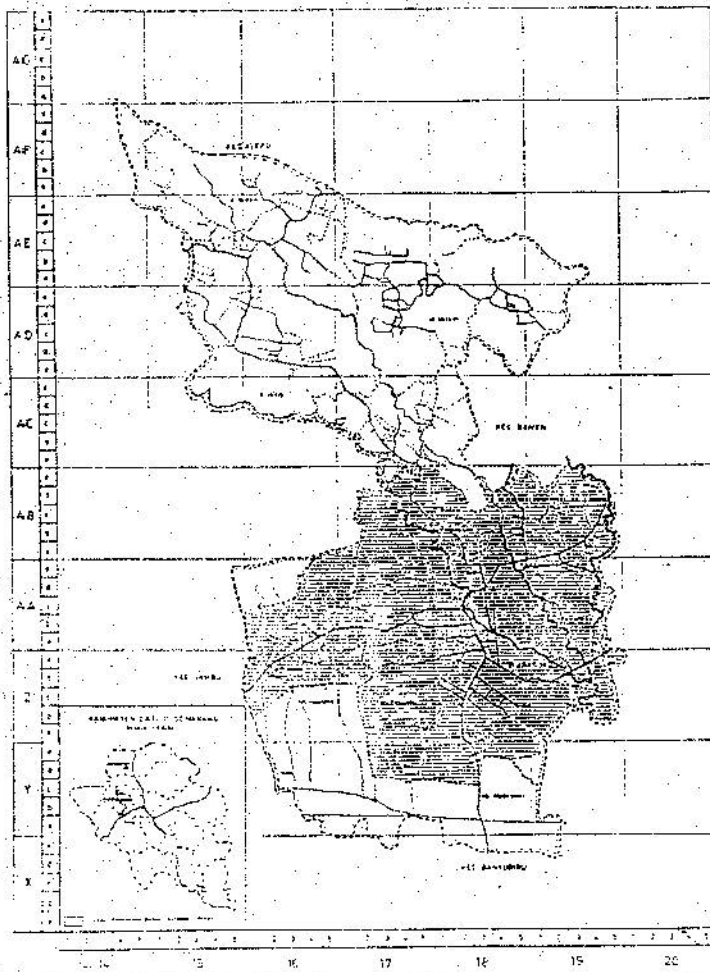
Skala 1 : 20.000
+02 0 47 01 05 00 14M

KETERANGAN

- Batas Wilayah Perkotaan
- Ruang yang diperlukan untuk pengembangan
- atau 30 tahun mendatang
- Jalan Utama
- Jalan Sekunder
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Saluran

TEAM TEKNIS PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG





**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

DHARMOTAMA SATYA, PRALAI

**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KECAMATAN AMBARAWA**

PETA No. 8

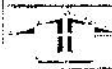
WILAYAH KOTA

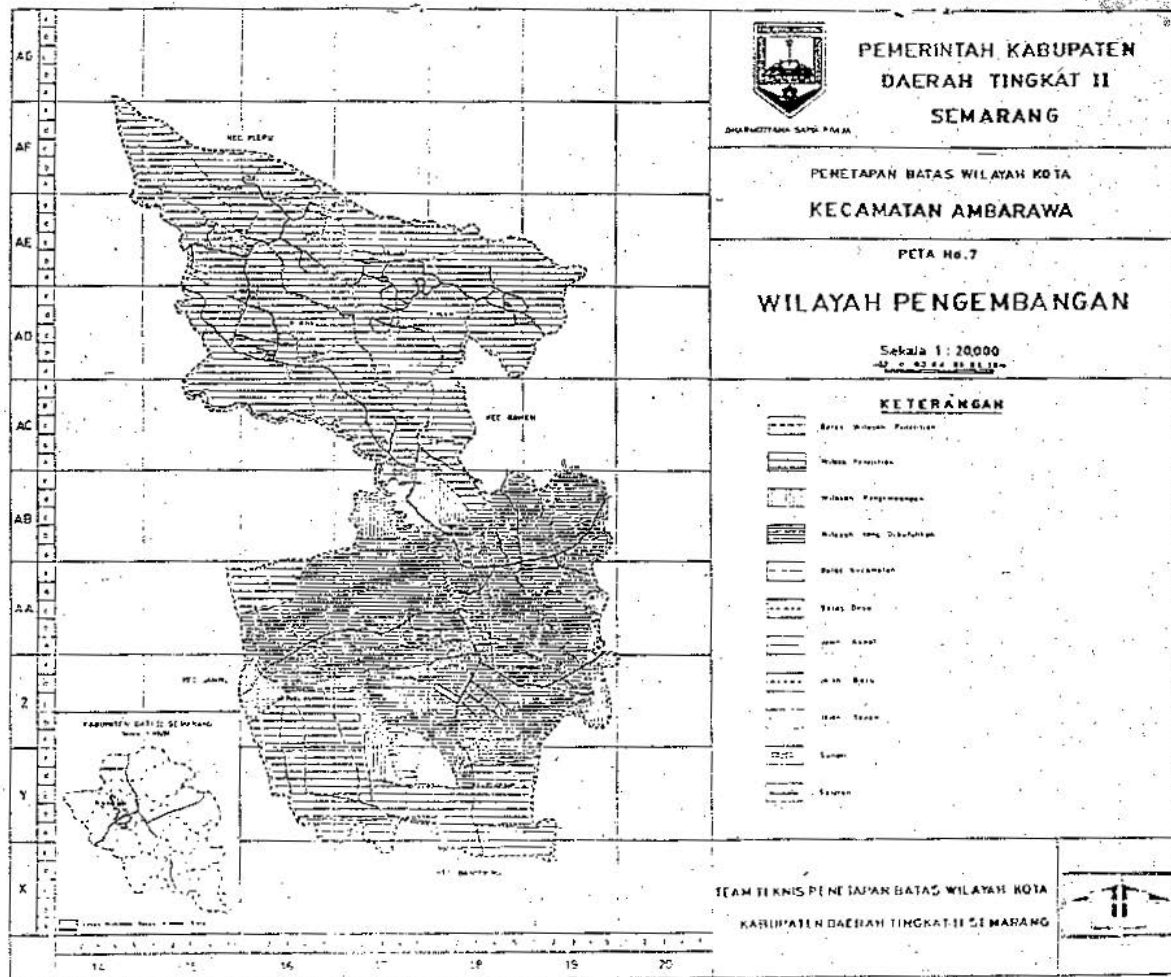
Skala 1 : 20.000
+ 2° 1' 30" S 104° 54' 00" E

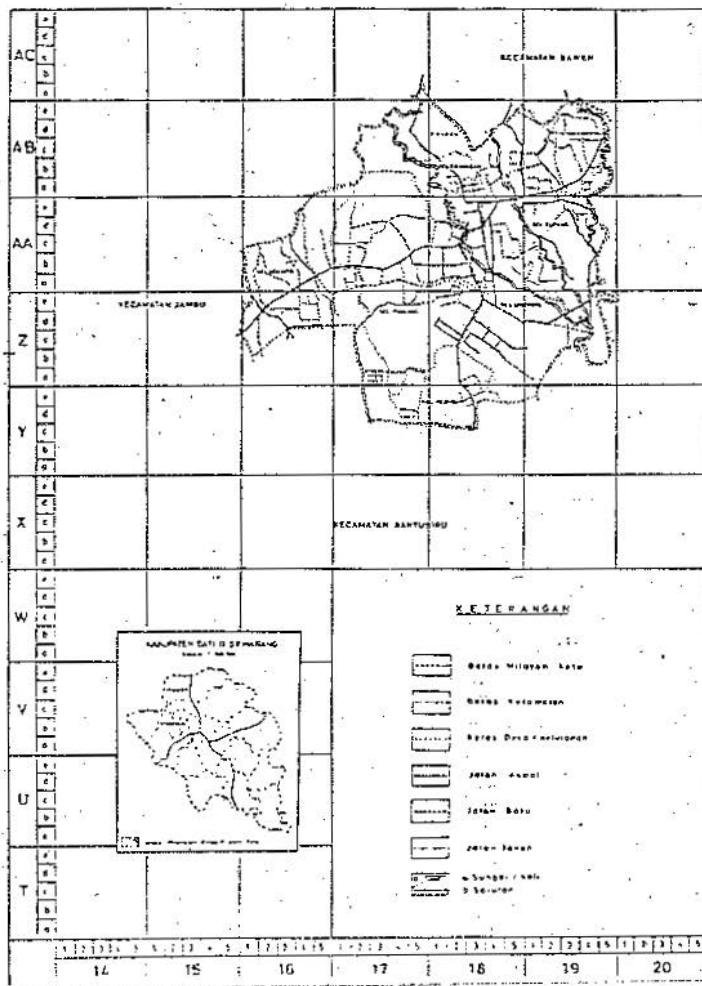
KETERANGAN

- Batas Wilayah Kecamatan
- Batas Kota
- Wilayah Pengembangannya (Wilayah Kota)
- Jalan Bypass
- Jalan Batas
- Jalan Tengah
- Jalan Kacamatan
- Jalan Desa
- Sungai
- Saluran

TEAM TEKNIS PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG







**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

DAUNCIKAL SOTO PRJA

**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KECAMATAN AMBARAWA**

PETA No. 9

ADMINISTRASI WILAYAH KOTA

Skala 1 : 20.000
-61 0 51.54 06.03 114

DITETAPKAN DI UNGRAH

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

Drs. SOEPOMO **Drs. SOEDIJATNO**

**TEAMTEKNISPENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**